



**EVALUASI KERJA SAMA TIONGKOK – MYANMAR DALAM
MENANGANI PERDAGANGAN PEREMPUAN
PADA 2008 – 2013**

Arie Widowati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Women trafficking is one of international crimes which keeps increasing by the number of the cases and also the victims. One of the examples is trafficking in women that happens in China and Myanmar. In order to tackle the crime, both countries enacted a cooperation in 2007, considering that the crime takes place across both national borders. Thus the purpose of this research is to give an explanation regarding this phenomenon over the period 2008 – 2013. In order to identify the linkage between the two variables, Kenneth Waltz's theory of international cooperation is applied as well as the concept of security which encompasses 'high politics' and 'low politics' (Kenneth Waltz and Ripsman). This research results in a conclusion that the increase of trafficking in women cases during that period was due to lack of efforts and implementation of cooperation which were of both countries. Moreover, the issue of trafficking in women being put into the 'low politics' sector instead of 'high politics' resulted in low urgency which also affected this phenomenon.

Keywords: *women trafficking, China, Myanmar, international cooperation*

1. Pendahuluan

Perempuan merupakan objek perdagangan manusia yang paling diminati. Berdasarkan data yang disampaikan oleh *US Department of Justice* bisa dilihat bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2010, dari sekitar 2515 kasus pendugaan perdagangan manusia terdapat sekitar 87 persen diduga sebagai kasus *sex trafficking*. Korban industri seks ini mayoritas adalah perempuan. Dari total 460 kasus terdapat 432 kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban *sex trafficking*. Kasus perdagangan perempuan ini paling banyak terjadi di kawasan Asia (Holly Tuppen, 18/07/13).

Fenomena perdagangan perempuan ini juga terjadi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tiongkok yang merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 1.33 juta orang ini adalah negara nomor satu terbanyak populasinya di dunia. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Tiongkok memiliki ketimpangan rasio jumlah laki-laki dan

perempuannya. Berdasarkan informasi dari Departemen Keamanan Publik di Tiongkok, kasus perdagangan perempuan yang terjadi kini meningkat menjadi 50-60% dari semua jumlah kasus perdagangan manusia yang ada. Mayoritas perdagangan perempuan atau perdagangan perempuan di Tiongkok ini adalah perempuan yang berusia 17-25 tahun (www.humantrafficking.org, 2014).

Tiongkok merupakan negara tujuan perdagangan perempuan di wilayah Asia. Adanya potensi perdagangan perempuan ini dilihat berdasarkan ketimpangan jumlah rasio antara laki-laki dan perempuannya. Sejak tahun 1980 telah terjadi ketimpangan rasio antara jumlah laki-laki dan perempuannya sebesar 3,2 persen. Ketimpangan rasio ini terus menerus meningkat sampai tahun 2011 mencapai angka 3,8 persen. Pada tahun 2012 juga diindikasikan adanya kemungkinan sebanyak 117.78 bayi laki-laki dari 100 bayi perempuan (www.trust.org, 2014). *The Chinese Academy of Social Sciences* pun menyatakan pada tahun 2020 akan ada 24 juta orang laki-laki pada umur kematangan menikah (19 – 45 tahun) tidak dapat menemukan pasangan (www.humantrafficking.org, 2014).

Myanmar adalah negara penyumbang terbesar terhadap perdagangan perempuan yang akan dipaksa menikah di Tiongkok (Eimer, 2011). Pemerintah Myanmar sendiri menyatakan bahwa sekitar 90 persen kasus perdagangan perempuan yang terjadi di Myanmar adalah kasus pernikahan paksa dengan laki-laki Tiongkok. Para perempuan Myanmar ini diperdagangkan ke Tiongkok untuk bekerja di industri seks atau menjadi pengantin bagi para lelaki di Tiongkok (www.humantrafficking.org, 2014). Para lelaki Tiongkok ini bersedia membayar lebih dari US\$ 8000 kepada para broker untuk mengatur pernikahan dengan perempuan Myanmar tersebut (www.irinnews.org, 2011). Melalui para broker pernikahan ini, perempuan-perempuan Myanmar ditawarkan \$3500 jika mereka mau menikahi lelaki Tiongkok dan bahkan memberikan keturunan. Jumlah tersebut melebihi pendapatan rata-rata masyarakat Myanmar (Chen, 2013).

Untuk menghadapi permasalahan tersebut Tiongkok berinisiasi untuk menjalin kerja sama dengan Myanmar dalam menangani maraknya perdagangan perempuan tersebut. Tiongkok dan Myanmar kemudian menggelar kerja sama *Border Liaison Office Meeting on Anti-Trafficking and Joint Border Visit* pada Februari 2007 silam. Pertemuan ini membahas pengecekan pada titik-titik wilayah perbatasan di Tiongkok dan Myanmar yakni Yinjing Village dan Jiegao, Shin Phyu, Nan Taw, dan beberapa *Border Trade Zone* (www.un-act.org, 2014). Perjanjian ini membahas tiga tujuan utama dalam permasalahan perdagangan perempuan yang terjadi di Tiongkok dan Myanmar. Pertama, penyelamatan sekaligus pemulangan korban secara aman dan tepat waktu. Kedua, ekstradisi warga negara yang terlibat dalam praktek perdagangan manusia ke negara asal untuk dihukum. Ketiga, pengendalian migrasi lintas batas yang ilegal di kedua negara.

Pada tahun 2010, Direktur Departemen Investigasi Kriminal Ruili (salah satu daerah di Provinsi Yunnan, Tiongkok) melaporkan bahwa total 489 perempuan Myanmar telah dipulangkan sejak pembukaan BLO dan jumlah ini cenderung meningkat meskipun tidak ada laporan baru-baru tersedia (Shih, 2013). Selain itu pada tahun 2012, diadakan Pertemuan Tahunan antara Myanmar dan Tiongkok. Pertemuan tersebut memutuskan untuk mengambil langkah maju dalam pencegahan, penegakan hukum dan respon peradilan pidana, dan perlindungan korban. Kedua belah pihak juga sepakat untuk bersama-sama melakukan kampanye pencegahan di provinsi kembar dengan menggunakan mekanisme saat BLO (*Border Liaison Office*). Tiongkok–Myanmar juga menyepakati pembukaan BLO

yang ketiga (Lauk Kaing/Nansan) pada kuartal 1 tahun 2013 (www.myanmarhumantrafficking.gov.mm, 2014).

Pada tahun 2012 juga Tiongkok dan Myanmar berencana untuk berkolaborasi dalam beberapa bidang yakni pada bidang pencegahan, Tiongkok dan Myanmar melakukan kampanye dan peningkatan pesan untuk menyadarkan masyarakat bahayanya perdagangan perempuan yang terjadi di kedua negara, juga pendirian *hotline* di Tiongkok dan Myanmar; selanjutnya pada bidang penegakan dan peradilan pidana adanya pelatihan bersama para petugas BLO, adanya pertemuan rutin dan *ad-hoc* dari BLO, peningkatan identifikasi titik fokus perdagangan manusia, pertukaran intelijen dan informasi antar aparat penegak hukum, serta ekstradisi tersangka dan pelaku perdagangan untuk diadili di negara asal; dan pada bidang perlindungan korban, kedua negara melakukan tinjau lapangan lebih sering serta meningkatkan praktek repatriasi dan peningkatan tantangan dan masalah korban dalam verifikasi informasi (www.myanmarhumantrafficking.gov.mm, 2014).

Namun kedua negara masih dianggap tidak memiliki keseriusan dalam menangani perdagangan manusia khususnya perempuan. Berdasarkan laporan TIP sejak tahun 2008 sampai 2012, Tiongkok yang menempati posisi Tier 2 WL telah diberikan kesempatan untuk membawa dirinya sesuai dengan standar minimum penghapusan perdagangan manusia. Tetapi kesempatan ini tidak digunakan dengan baik oleh Tiongkok karena tidak adanya upaya signifikan untuk memenuhi standar tersebut yang kemudian membawa Tiongkok diturunkan menjadi Tier 3 di tahun 2013 (www.state.gov, 2013). Pemerintah US menyatakan bahwa Tiongkok tidak serius dalam memerangi perdagangan manusia karena masih melanggar *One Child Policy* (www.state.gov, 2013). Selain itu pemerintah Tiongkok juga tidak melaporkan adanya penyediaan layanan perlindungan korban yang komprehensif baik bagi korban domestik maupun asing. Tiongkok juga dianggap memberikan sedikit informasi tentang penangkapan atau penuntutan sehingga sulit ditentukan apakah Pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghukum para pelaku kejahatan perdagangan manusia (www.beijing.usembassy-tiongkok.org.cn, 2012).

Hal yang sama juga terjadi pada Myanmar yaitu stagnansi peringkat di *Tier Placements* dialami pada tahun 2008-2011. Sejak tahun 2008 sampai 2011 Myanmar menduduki peringkat Tier 3, hal ini diindikasikan karena keadaan ekonomi negara tersebut buruk. Pemerintah Myanmar memang melakukan upaya untuk mengatasi perdagangan seks lintas batas negara yang melibatkan perempuan, namun kerja paksa warga sipil yang dilakukan oleh para pejabat rezim dan pengerahan tentara paksa tetap terjadi. Ini merupakan faktor pendorong meningkatnya permasalahan perdagangan manusia khususnya perempuan. (www.state.gov, 2013).

Selain itu, kasus perdagangan perempuan yang terjadi di kedua negara masih terus meningkat. Kasus perdagangan perempuan yang terjadi di Tiongkok dikatakan suram tanpa harapan (Emilie, 19/05/14). Ditegaskan oleh beberapa media massa di Tiongkok yang melaporkan adanya prevalensi gadis dibawah umur dalam perdagangan seks di seluruh kota di wilayah Tiongkok (www.state.gov, 2013). Media melaporkan sejak tahun 2007 sampai pertengahan 2008 terdapat setidaknya 301 kasus perdagangan manusia yang terjadi di Provinsi Yunnan, Guizhou, Fujian, Shandong dan Henan di Tiongkok (www.no-trafficking.org, 2014).

Masalah perdagangan manusia khususnya perempuan ini menjadi masalah serius bagi kedua negara karena adanya laporan pemerintah Myanmar sekitar 85 persen korban perdagangan manusia adalah perempuan. Ditegaskan dalam laporan tersebut, setidaknya

dari 731 kasus perdagangan manusia yang dilaporkan antara Januari 2006 sampai Agustus 2011 terdapat 585 kasus yang terkait dengan Tiongkok. Kemudian sebanyak 1305 orang yang diselamatkan selama lima tahun terakhir termasuk 780 orang dari Tiongkok dan diduga ini adalah puncak angka korban perdagangan manusia di Myanmar (Green, 11/02/13). Pada tahun 2010 Pemerintah Myanmar juga mencatat 122 kasus perempuan Myanmar telah diperdagangkan untuk menjadi pengantin di Tiongkok meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 104 kasus (www.irinnews.org, 2011). Pada awal tahun 2012 sudah terdapat 103 kasus perdagangan perempuan dari Myanmar ke Tiongkok (www.trust.org, 2014).

2. Pembahasan

Permasalahan perdagangan perempuan di Tiongkok ini pelik karena perempuan yang diperdagangkan ini adalah untuk laki-laki yang memiliki status sosial rendah. Pada tahun 1990, jumlah laki-laki dengan status sosial yang rendah seperti petani miskin dan tidak menikah sampai umur 40 tahun adalah sebanyak 19%. Kemudian pada tahun 2000 laki-laki dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak menikah sampai umur 30 tahun adalah sebanyak 44,8%. Jumlah laki-laki dengan status sosial yang rendah ini berkisar antara 40-50 juta laki-laki (Chu, 2011:42).

Komoditas perempuan terbesar yang diekspor ke Tiongkok adalah berasal dari Myanmar. Dibawah pemerintahan Junta Militer Myanmar, terjadinya kenaikan harga barang-barang pokok, biaya pendidikan serta kesehatan yang akhirnya membuat masyarakat Myanmar memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kenyataan pahit ini ditambah dengan adanya kondisi politik dan ekonomi Myanmar yang tak kunjung baik kemudian membuat para perempuan akhirnya memiliki keinginan untuk mendapat pekerjaan yang layak untuk ikut serta menghidupi keluarga mereka. Selain karena kedekatan wilayah, perekonomian Tiongkok yang jauh lebih maju ketimbang Myanmar ini seolah memberikan harapan kepada para perempuan Myanmar. Para perempuan Myanmar ini berharap untuk merubah nasib dan memperbaiki kualitas hidup mereka dengan bekerja di Tiongkok (Mustari, 2013:43).

Contoh nyata praktek perdagangan perempuan Myanmar di Tiongkok adalah Ma Moe Moe yang berhasil melarikan diri pada Oktober 2012. Ma Moe Moe adalah seorang wanita Myanmar berumur 23 tahun yang dijual kepada seorang laki-laki Tiongkok di Provinsi Guangdong. Menurut Ma Moe Moe, ia dibeli oleh seorang pria Tiongkok melewati broker untuk menjadi istrinya. Lelaki Tiongkok ini akan menjadikan Ma Moe Moe sebagai istrinya ketika ia berhasil memberi keturunan laki-laki, namun jika keturunan yang diberikan adalah perempuan maka Ma Moe Moe akan dijadikan seorang budak sekaligus buruh paksa di lading sampai bisa memberikan keturunan laki-laki. Menurut kesaksian Ma Moe Moe, banyak perempuan Myanmar yang bernasib sama seperti dirinya bahkan mengalami penyiksaan didepan matanya sendiri. Ma Moe Moe datang ke Tiongkok dengan maksud mencari pekerjaan yang lebih baik namun ia ditipu (Sandar, 07/01/13).

Perdagangan manusia di Tiongkok begitu diperhatikan oleh mata dunia karena sejumlah faktor diantaranya yaitu *pertama*, masalah perdagangan perempuan di Tiongkok ini sangat sulit untuk dipecahkan. Terlepas dari jalur perdagangan perempuan yang kompleks, jaringan broker yang sangat rapi, serta pengiriman korban melewati jarak yang jauh. Hal ini sesuai dengan pernyataan organisasi-organisasi internasional yang memiliki masalah dalam memantau kasus perdagangan perempuan di Tiongkok. Para organisasi internasional tersebut juga menyatakan bahwa seiring dengan kecanggihan zaman,

transportasi serta komunikasi yang digunakan pun menjadi lebih canggih sehingga sulit dilacak (Chu, 2011: 40).

Kedua, terdapatnya bentuk-bentuk penganiayaan yang sangat kejam sehingga bahkan kadang menyebabkan kematian terhadap korban perdagangan perempuan sehingga sulit mendapatkan informasi yang lebih akurat. Ketiga, keuntungan besar yang diperoleh dalam perdagangan perempuan ini merupakan faktor vital yang akhirnya menyebabkan kelanggengan bahkan ekspansi kejahatan ini terus berlanjut. Bahkan para broker perdagangan perempuan ini yang berada di Tiongkok ini diduga adalah sentral utama dari perdagangan perempuan yang ada di dunia (Chu, 2011: 40).

Faktor selanjutnya adalah ketidakseimbangan *gender* dimana jumlah laki-laki di Tiongkok lebih banyak daripada jumlah perempuannya. Sudah merupakan rahasia umum bahwa laki-laki dewasa di Tiongkok sulit menemukan perempuan untuk dijadikan pasangan hidup. Hal tersebut yang kemudian menjadi faktor penyebab banyaknya permintaan terhadap perempuan di Tiongkok untuk dijadikan pengantin dan ini didatangkan dari luar negeri. Para kelompok broker perdagangan perempuan ini melihat peluang emas untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga kejahatan ini terus mengalami peningkatan. Para broker perdagangan perempuan ini membawa perempuan untuk dijual dengan harga tinggi kepada para lelaki Tiongkok tersebut. Korban perdagangan perempuan ini kebanyakan dari Myanmar, Vietnam dan Korea Utara (www.ilo.org, 2012).

Para korban perdagangan perempuan dari Myanmar ini kebanyakan berasal dari daerah pedesaan dan memiliki status sosial yang rendah. Sebagian besar perempuan Myanmar yang dijadikan komoditas adalah pengangguran atau pedagang pakaian dan makanan. Tingkat perekonomian yang rendah dan pekerjaan yang tidak layak ini merupakan alasan utama para perempuan Myanmar pergi merantau sampai ke Tiongkok. Namun bukan pekerjaan yang layak maupun penghasilan lebih besar yang mereka dapat, melainkan nasib mereka berakhir untuk dijual sebagai pengantin. Harga jual perempuan sebagai pengantin ini semakin tinggi seiring dengan semakin banyaknya permintaan. Pada tahun 2008, perempuan muda yang memiliki paras cantik nan menarik ini ditaksir seharga 20.000-30.000 Renminbi (RMB). Namun pada tahun 2009 karena banyaknya permintaan, harga jual perempuan yang tidak memiliki paras cantik berada pada kisaran 38.000 - 50.000 RMB (www.irinnews.org, 2015).

Para perempuan Myanmar ini dijual ke daerah-daerah terpencil di Tiongkok. Mereka dijual kepada petani-petani yang sudah berumur dan bahkan kadang sialnya yang memiliki gangguan fisik bahkan mental. Para lelaki ini membeli pengantin perempuan karena memiliki keinginan untuk melanjutkan keturunan dan ingin membangun rumah tangga. Para lelaki tersebut merasa dengan membeli pengantin perempuan ini kedua permasalahan tadi dapat terselesaikan. Namun saat ini, pembelian perempuan untuk dijadikan sebagai pengantin telah berubah menjadi tren masa kini di beberapa daerah di Tiongkok (Mustari, 2013: 43).

Ada dua metode yang dikembangkan dalam melihat pernikahan sebagai salah satu bentuk perdagangan perempuan. *Pertama*, bila pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan terutama jika pada akhirnya akan ditujukan pada industri hiburan atau prostitusi. *Kedua*, ketika sebuah pernikahan dikomersialisasikan yang biasanya dilakukan dengan berbagai tahapan seperti proses perjodohan. Dua hal tersebut yang bisa dianggap sebagai kategori perdagangan perempuan atau *bride trafficking* (Mustari, 2013:47).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pun berdampak pada perkembangan kejahatan perdagangan perempuan di Tiongkok dan Myanmar. Banyaknya

penawaran jasa perjodohan bagi laki-laki di Tiongkok dengan perempuan Myanmar melalui perantara yang biasa disebut dengan broker. Broker tersebut bisa siapa saja, individu maupun kelompok dan mereka merupakan perantara atau kasarnya adalah makelar dari bisnis perdagangan perempuan ini. Para broker tersebut kemudian berjanji kepada calon korban dan keluarga calon korban untuk menjodohkan korban kepada orang yang baik-baik dan mapan. Di beberapa daerah di Tiongkok yang merupakan daerah terpencil dan para lelakinya berada pada status sosial yang rendah maka para broker perdagangan perempuan ini merupakan jawaban dari permasalahan mereka untuk memiliki pasangan. Melalui broker tersebut, para laki-laki ini dipertemukan dengan perempuan dan dinikahkan. Seluruh biaya perjodohan ini ditanggung oleh para laki-laki yang memesan. Setelah menikah, para broker ini tidak lagi memiliki tanggung jawab apapun terhadap si perempuan. Ironisnya adalah tidak sedikit para suami yang memiliki status sosial rendah ini memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah pula, sehingga para suami cenderung emosional dan suka melakukan kekerasan terhadap korban (Mustari, 2013: 47).

Sebagai negara yang memiliki perekonomian yang lebih baik dari Myanmar, Tiongkok juga tidak lepas dari perkembangan industri hiburan yang juga lebih baik. Para perempuan di Myanmar ini tidak hanya dijual sebagai pengantin namun juga untuk memenuhi kebutuhan industri hiburan di Tiongkok. Perempuan yang merupakan korban untuk dunia hiburan ini adalah korban perekrutan dan penipuan. Biasanya para korban ditawarkan pekerjaan yang lebih layak di Tiongkok tapi berakhir tragis yaitu di industri hiburan dan prostitusi. Pada awalnya mereka diberikan obat-obatan terlarang untuk dikonsumsi sehingga mereka tidak ingat dan tidak sadar apa yang mereka sedang atau telah lakukan. Para korban yang menjadi pekerja seks ini kemudian tidak memiliki banyak ruang gerak karena selalu terikat dan diawasi oleh para mucikarinya (Mustari, 2013:47).

Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan perempuan yang terjadi di Tiongkok dan Myanmar ini, kedua negara tidak tinggal diam. Kedua negara akhirnya memutuskan untuk menangani kasus tersebut melalui upaya bersama. Salah satu upaya bersama kedua negara adalah dengan menggelar kerja sama *Border Liason Office Meeting on Anti-Trafficking and Joint Border Visit* pada Februari 2007 silam. Pertemuan kerja sama dua negara yang dihadiri oleh sebanyak 35 pejabat kedua negara dan 16 perwakilan badan LSM Internasional dan PBB ini membahas pengecekan pada titik-titik wilayah perbatasan di Tiongkok dan Myanmar yakni Yinjing Village dan Jiegao, Shin Phyu, Nan Taw, dan beberapa *Border Trade Zone* (www.un-act.org, 2014). Kerja sama *Border Liaison Offices* (BLOs) sendiri adalah membangun kantor-kantor pengawasan di beberapa lokasi strategis seperti sepanjang perbatasan Tiongkok dan Myanmar. Tujuan dibangunnya BLOs ini adalah untuk berbagi informasi, pertukaran intelijen, penangkapan pelaku perdagangan, penuntutan pelaku perdagangan, serta bahu membahu dalam penyelamatan dan pemulangan korban perdagangan perempuan (www.myanmarhumantrafficking.gov.mm, 2014).

Namun peningkatan kasus maupun korban perdagangan perempuan terus menerus terjadi pada tahun-tahun setelah dijalinnya kerja sama. Meskipun memang terjadi penurunan pada tahun 2012 dan 2013, angka penurunan pada tahun tersebut tidak memiliki signifikansi sebesar peningkatannya di tahun 2008 – 2011. Maka kemudian kerja sama yang dijalin oleh kedua negara dalam menangani perdagangan perempuan dapat dikatakan tidak optimal. Sebagai contoh, salah satu tujuan BLO adalah melakukan transfer korban dalam arti pemulangan ini berarti BLO tidak menangani kebutuhan fisik maupun mental korban baik di negara sumber maupun di negara tujuan. Disebabkan karena fakta bahwa fungsi utama BLO ini adalah perbatasan, sehingga banyak kebutuhan emosional dan

materiil yang tidak dapat dipenuhi oleh BLO tersebut. Maka kemudian proses bilateral ini mengindikasikan bahwa memang kualitas pelayanan yang diberikan adalah jauh dari kata baik. Selanjutnya dengan memfokuskan upaya pada kepolisian dan patrol perbatasan, intervensi seperti BLO ini mengabaikan sumber risiko sistemik untuk perdagangan perempuan dan masalah sosial lainnya di wilayah perbatasan. Hal-hal tersebut disebabkan karena fungsi blo ini hanya pada perbatasan, sehingga banyak kebutuhan emosional dan material melebihi kapasitas blo tersebut (Shih, 2013). Selain itu, kerja sama tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan juga disebabkan karena isu perdagangan perempuan masuk kedalam bidang *low politics*.

Jika dilihat dari berbagai sektor, baik Tiongkok dan Myanmar jika memang ingin mereduksi peningkatan perdagangan perempuan, sangat mungkin jika kedua negara meningkatkan usahanya melalui kerja sama yang bersinggungan langsung dengan perdagangan perempuan dibuat lebih banyak sehingga akan terjadi reduksi peningkatan perdagangan perempuan di Tiongkok juga Myanmar. Namun yang ditemukan penulis adalah bahwa kedua negara tidak melakukan hal tersebut sehingga perdagangan perempuan tetap meningkat. Selain itu, Tiongkok dan Myanmar juga tidak mau mengupayakan berbagai usaha untuk menangani isu perdagangan perempuan ini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kapasitas sumberdaya manusianya. Jumlah kapasitas sumberdaya manusia yang ada di Tiongkok dan Myanmar begitu banyak namun yang diturunkan untuk menangani perdagangan perempuan khususnya di perbatasan sangat jauh dari kata cukup. Baik Tiongkok dan Myanmar mempunyai sumberdaya manusia di bidang pertahanan nasional yang sangat banyak namun tidak diterjunkan untuk juga ikut menangani perdagangan perempuan yang terjadi di kedua negara. Padahal secara tidak langsung tugas daripada pertahanan nasional adalah mengamankan negara dari ancaman yang datang dari luar yang artinya perdagangan perempuan yang merupakan kejahatan lintas batas negara adalah ancaman dari luar negara dan seharusnya pertahanan nasional ikut menanganinya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh kedua negara. Tindakan ini bila dilihat karena jangkakan untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan, baik Tiongkok dan Myanmar memang sebenarnya kedua negara tidak menganggap bahwa perdagangan perempuan harus diturunkan sebagai fokus utama karena memang isu tersebut masuk kedalam jenis keamanan non tradisional yang urgensinya kurang signifikan ketimbang keamanan tradisional.

Hal tersebut juga berhubungan langsung dengan adanya kekurangan dana dalam menangani perdagangan perempuan. Adanya kekurangan biaya operasional mengindikasikan langsung adanya keterbatasan orang yang dapat digaji baik untuk menangani perdagangan perempuan secara administratif maupun yang diturunkan langsung dalam penanganan perdagangan perempuan tersebut. Adanya kekurangan dana pun menyebabkan peralatan dan penyediaan sarana penampungan korban perdagangan perempuan ini kurang memadai. Tidak hanya itu, jika dilihat lebih dalam maka kekurangan dana ini pun menyebabkan kesulitan bagi perpanjangan tangan Pemerintah Tiongkok untuk melakukan pemulangan korban. Melihat sedikitnya usaha yang dilakukan oleh Tiongkok dan Myanmar dalam menangani perdagangan perempuan ini kembali menimbulkan pertanyaan sebenarnya apakah isu lain yang memiliki urgensi lebih penting bagi kedua negara, karena jika memang tidak ada urgensi yang lebih penting daripada isu perdagangan perempuan ini harusnya bukan tidak mungkin kedua negara melakukan peningkatan kebijakan dan kerja sama dalam menangani isu tersebut sehingga dapat mereduksi peningkatan.

Ternyata jika dilihat kembali, berbagai kerja sama kedua negara di bidang *high politics* seperti politik, ekonomi dan militer jauh lebih maksimal ketimbang bidang *low politics* seperti perdagangan perempuan. Berdasarkan perbandingan kerja sama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Myanmar sebelumnya, terlihat bahwa kerja sama pada isu seperti ekonomi yang notabene adalah bidang *high politics* jauh lebih banyak daripada isu perdagangan perempuan yang termasuk dalam bidang *low politics*. Hal tersebut dipertegas lagi dengan minimnya pembuatan kebijakan yang pro terhadap perdagangan perempuan dan bila dibandingkan dengan kebijakan politik terlihat timpang. Selanjutnya anggaran dana yang dialokasikan kepada bidang *high politics* jauh lebih besar ketimbang *low politics*. Anggaran dana tersebut berimbas kepada penurunan sumberdaya manusia dalam kedua bidang tersebut, dimana bidang *high politics* seperti isu militer mendapat porsi yang lebih banyak daripada bidang *low politics* seperti isu perdagangan perempuan.

3. Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan perempuan di Tiongkok dan Myanmar terus menerus mengalami peningkatan karena usaha kedua negara dalam menangani permasalahan tersebut sangat minim. Hal ini dapat dilihat berdasarkan studi komparasi implementasi kerja sama maupun kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok dan Myanmar dalam isu perdagangan perempuan tidak sebanding dengan isu-isu lainnya. Selain itu memang ada faktor lain yang menyebabkan isu perdagangan perempuan menjadi dikesampingkan. Ini karena isu perdagangan perempuan masuk kedalam bidang *low politics* yang memang memiliki urgensi yang lebih lemah bila dibandingkan dengan bidang *high politics*. Maka, masuk akal jika capaian dan kerja sama Tiongkok dan Myanmar dalam bidang *high politics* terus meningkat.

Daftar Pustaka

- Beijing - US Embassy. 2012. China – TIER 3*. Diakses dari <http://beijing.usembassy-china.org.cn/2012tipr.html> (diakses pada 16 September 2014 pukul 12.18 WIB)
- Chen, Lusha. 2013. “Burmese Brides Along the Chinese Border”
- Chu, Yik-Yi Cindy. 2011. “Journal of Contemporary China: Human Trafficking and Smuggling in China”
- Eimer, David. 2011. Burma’s Women Forced to be Chinese Brides. Diakses dari http://burmanationalnews.org/burma/index.php?Option=com_content&view=article&id=681:news-headlines-september-4-2011&catid=48:news-headlines (diakses pada 1 Desember 2014 pukul 13.56 WIB)
- Green, Graeme. 2013. The Burmese Brides Trafficked Into China to Marry Total Strangers. Diakses dari <http://metro.co.uk/2013/02/11/the-burmese-brides-trafficked-into-china-to-marry-total-strangers-3398396/> (diakses pada 13 September 2014 pukul 18.45 WIB)
- Humantrafficking.org. 2014. Burma. Diakses dari <http://www.humantrafficking.org/countries/burma> (diakses pada 18 September 2014 pukul 08.01 WIB)
- ILO. 2012. ILO Global Estimate of Forced Labour Results and Methodology
- IRIN. 2011. Myanmar: Bride Trafficking to China Unveiled. Diakses dari <http://www.irinnews.org/report/92868/myanmar-bride-trafficking-tochina-unveiled> (diakses pada 15 September 2014 pukul 14.23 WIB)

- Myanmar Gov. 2012. Myanmar-China to Hold Joint Human Trafficking Prevention Campaigns. Diakses dari <http://myanmarhumantrafficking.gov.mm/content/myanmar-china-hold-joint-human-trafficking-prevention-campaigns> (diakses pada 21 Desember 2014 pukul 23.09 WIB).
- Mustari, Devi Ivon. 2013. Dalam Skripsi yang berjudul Kebijakan Luar Negeri China dalam Penanganan Women Trafficking
- Oo, Sandar Soe. 2013. Myanmar's Brides to China Top Human Trafficking List. Diakses dari <http://www.mmmtimes.com/index.php/national-news/3705-brides-to-china-top-govt-human-trafficking-list.html> (diakses pada 11 Maret 2015 pukul 02.05 WIB)
- Shih, Elena. 2013. "Health and Rights at the Margins: Human trafficking and HIV/AIDS amongst Jingpo ethnic communities in Ruili City, China"
- Tuppen, Holly. 2013. Addressing Human Trafficking in The Hospitality Industry. Diakses dari <http://www.greenhotelier.org/know-how-guides/addressing-human-trafficking-in-the-hospitality-industry/> (diakses pada 1 Desember 2014 pukul 15.09 WIB)
- Thomson Reuters Foundation. 2014. Myanmar's Trafficked Brides Fill China's Shortage of Women. Diakses dari <http://www.trust.org/item/?Map=myanmars-trafficked-brides-fill-chinas-women-shortage/> (diakses pada 21 Desember 2014 pukul 17.05 WIB).
- United Nation Act for Cooperation Against Trafficking in Persons. 2014. UN-ACT China.
- United States Government. 2013. China 2013 Trafficking in Persons Report.